

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/ 34 /D.I.M.EKON.1/04/2026

Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Deputy 1 Triwulan I T.A 2026
Tanggal : 1 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan I T.A 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/BuktidukungLapkinD1TW1>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' shape followed by a circular flourish and a horizontal line.

Muhammad Saifulloh

Tembusan Yth.:

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
BUMN Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>					
1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Triliun	248,30	46,81	44,58	95,24
1.2	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	Persen	82	20	56,28	120,00
1.3	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	Persen	80	20	100	120,00
1.4	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	Persen	80	20	20	100,00
1.5	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	80	20	20	100
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	3,48	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>					
3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	92,5	91	91	100,00
IV	<i>Sasaran Program 4. Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</i>					
4.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	Persen	80	80	80	100
V	<i>Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I	Capaian (%)
5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	1	33,33
5.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	1	33,33
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3	100,00
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	92	20	27,27	120,00

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR
3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP
4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN

Latar Belakang

Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan *multiplier effect* dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputy 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputy sesuai dengan sektornya sebanyak 20 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Badan Pengaturan BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Sektor	BUMN	Target (Miliar Rupiah)
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Holding Aviastar Pariwisata (InJourney)	1. 13.560,00
		2. PT Garuda Indonesia (Persero)	2. 16.650,00
		3. PT Telkom (Persero) Tbk	3. 23.460,00
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina	1. 70.886,09
		2. MIND ID	2. 6.394,52
		3. PT PLN	3. 61.009,17
		4. Pupuk Indonesia	4. 3.100,22
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. Holding Perkebunan	1. 13.250,40
		2. Holding Biro Klasifikasi Indonesia	2. 730,38
		3. Holding Defense	3. 1.453,37
		4. Holding Farmasi	4. 1.126,89
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Hutama Karya (Persero) Tbk	1. 6.934,60
		2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2. 6.884,30
		3. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3. 5.449,60
		4. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4. 7.449,30
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. Bank Rakyat Indonesia	1. 3.027,68
		2. Mandiri	2. 2.725,00
		3. Bank Negara Indonesia	3. 1.434,00
		4. Bank Tabungan Negara	4. 1.568,66
		5. Bank Syariah Indonesia	5. 1,205,08

Adapun target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 248,30 Triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil dialog kinerja dan juga koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait tentang rencana belanja modal BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Perhitungan IKU Belanja Modal BUMN merupakan akumulasi nilai belanja modal beberapa BUMN yang memenuhi kriteria, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Belanja Modal BUMN} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

Keterangan:

C₁: belanja modal BUMN ke-1

C₂: belanja modal BUMN ke-2

C₃: belanja modal BUMN ke-3

C_n: belanja modal BUMN ke-n

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp248,30 Triliun berdasarkan hasil dialog kinerja serta koordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN dan BUMN terkait.

Adapun target triwulan ditetapkan menyesuaikan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN (akumulatif) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Target (Rp)
s.d. Triwulan I	46,81 T
s.d. Triwulan II	100,55 T
s.d. Triwulan III	152,86 T
s.d. Triwulan IV	248,30 T

Hingga Triwulan I Tahun 2026, belanja modal BUMN (capex) yang telah terealisasi sebesar Rp44,58 T atau tercapai 95,26% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar Rp46,81 T dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun Rupiah	46,81	44,58	95,24

Rincian realisasi belanja modal pada Triwulan I sebagai berikut:

No	Sektor/BUMN	Realisasi TW I (Triliun Rupiah)
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi		11,48
1	Holding Aviiasi Pariwisata (InJourney)	3,29
2	PT Garuda Indonesia	3,29
3	PT Telkom	4,9
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		26,48
4	PT Pertamina	17,68
5	MIND ID	0,6
6	PT PLN	6,44
7	Pupuk Indonesia	1,76
Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan		0,53
8	Holding Perkebunan	0,36

9	Holding Biro Klasifikasi Indonesia	0,05
10	Holding Defense	0,02
11	Holding Farmasi	0,10
Sektor Infrastruktur dan Logistik		4,49
12	PT Utama Karya	1,37
13	PT Jasa Marga	1,32
14	PT Pelabuhan Indonesia	1,25
15	PT Kereta Api Indonesia	0,55
Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis		1,6
16	BRI	0,42
17	Mandiri	0,16
18	BNI	0,56
19	BTN	0,21
20	BSI	0,25*
TOTAL		44,58

* angka proyeksi Capex Triwulan I 2026

Mempertimbangkan capaian belanja modal BUMN sampai dengan Triwulan I serta upaya yang dilakukan, maka target belanja modal BUMN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Inventarisasi rencana belanja modal (Capex) dan identifikasi isu strategis yang menghambat Capex BUMN	Terlaksana	Surat Deputi I kepada Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BP BUMN Nomor: T/BUM.01/98/D.I.M.EKON/05/2026, tanggal 12 Mei 2026, hal Permintaan Data Target Realisasi Capex BUMN 2026 dan Realisasi Capex BUMN Triwulan I 2026
2.	Koordinasi dan sinkronisasi target belanja modal BUMN	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi oleh Asdep teknis, diantaranya: - Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina pada tanggal 12 Januari 2026.

-
- Telah dilakukan koordinasi dengan SugarCo atau PT SGN pada tgl 16 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Realisasi belanja modal pada Triwulan I 2026, berada dibawah target dari yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena adanya penataan ulang yang dilakukan oleh Danantara yang menyebabkan terhambatnya persetujuan anggaran-anggaran besar BUMN yang diberikan untuk pelaksanaan belanja modal. Pada sektor infrastruktur misalnya, tidak tercapainya target dipengaruhi oleh pergeseran fokus pembangunan Pemerintah dari pembangunan infrastruktur secara masif menjadi pembangunan infrastruktur untuk program-program penting yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Hal ini berdampak kepada turunnya permintaan pembangunan modal oleh BUMN yang tercermin pada realisasi TW I 2026 ini. Ketidakpastian perekonomian, khususnya terkait nilai kurs mata asing dan suku bunga, turut menyebabkan BUMN masih melakukan *wait and see* dan menyiapkan langkah strategis yang tepat untuk menyikapi kondisi-kondisi tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja adalah perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN serta optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN. Upaya pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex.

1.2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek penyediaan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia

pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Selain itu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR melalui penjaminan program KUR.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan target penyaluran KUR selama periode satu tahun. Target IKU pada tahun 2026 adalah tingkat efektivitas penyaluran KUR sebesar 80%. Indikator efektivitas penyaluran KUR terdiri dari capaian penyaluran KUR sektor produksi, debitur KUR baru, debitur KUR graduasi/naik kelas, dan realisasi penyaluran KUR.

Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

No	Indikator	Definisi	Bobot
1	Penyaluran KUR sektor produksi	Penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.	20%
2	Debitur baru KUR	Debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR	15%
3	Debitur KUR Graduasi	Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial.	5%
4	Realisasi Penyaluran KUR	Jumlah nominal KUR yang disalurkan kepada debitur	60%

Sumber: Manual IKU Deputi I (2026)

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR = (20% x capaian penyaluran KUR sektor produksi) + (15% x capaian debitur KUR baru) + (5% x capaian Debitur KUR graduasi/naik kelas) + (60% x realisasi penyaluran KUR)

Keterangan:

1. Penyaluran KUR sektor produksi
 - Perhitungan Realisasi Sektor Produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama periode waktu tertentu.
 - Capaian Sektor Produksi Tahunan : $\text{Realisasi Tahunan} / \text{Target Tahunan} \times 100\%$
 - Capaian Sektor Produksi Triwulanan : $\text{Realisasi Triwulanan} / \text{Target Triwulanan} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 20%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 20%
2. Debitur baru KUR
 - Perhitungan Debitur baru KUR adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

- Capaian Debitur KUR Baru : $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 15%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 15%
3. Debitur Graduasi/Naik Kelas
- Debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Debitur Graduasi/Naik Kelas : $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 5%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 5%
4. Realisasi Penyaluran KUR
- Realisasi Penyaluran KUR adalah jumlah realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan target penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Realisasi Penyaluran KUR : $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 60%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 60%

Adapun target dari masing-masing indikator sebagai berikut:

Target Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

Indikator	Target				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran KUR sektor produksi	54%	54%	54%	54%	54%
Debitur baru KUR	40%	10%	20%	30%	40%
Debitur KUR Graduasi	20%	5%	10%	15%	20%
Realisasi Penyaluran KUR (Rp)	251,17 T	62,79 T	125,58 T	188,37 T	251,17 T
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	82%	20%	40%	60%	82%

Sumber: Manual IKU Deputi I (2026)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR pada tahun 2026 adalah sebesar 82% ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja. Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar masing-masing 20% untuk Triwulan I s.d. III, dan 22% untuk Triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tingkat efektivitas penyaluran KUR yang telah terealisasi sebesar 56,28% atau mencapai 280% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	20	56,28	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Penyaluran KUR sektor produksi (20%)	54%	61,89%	100%	20%
Debitur baru KUR (15%)	10%	95,67%	100%	15%
Debitur KUR Graduasi (5%)	5%	43,92%	100%	5%

Realisasi Penyaluran KUR (60%)	251,17 T	68,17 T	27,14%	16,28%
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR				56,28%

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi pelaksanaan Kebijakan KUR 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026
2.	Pembahasan konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3.	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran KUR 2026	Terlaksana	Sosialisasi Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 12 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;

2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru

1.3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP

Latar Belakang

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pembiayaan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Kredit Program dimaksud meliputi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya, dan Kredit Program Perumahan, yang diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Kredit Program dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah, BUMN perbankan sebagai lembaga penyalur pembiayaan, serta lembaga penjaminan dalam rangka memperkuat mitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan. Peran BUMN dalam pelaksanaan Kredit Program mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian, penguatan industri yang berdaya serap tenaga kerja tinggi, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Indikator Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program menunjukkan sejauh mana penyaluran kredit program telah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan target kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kredit program diukur melalui tingkat efektivitas penyaluran kredit, yaitu perbandingan antara realisasi penyaluran dengan target tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah atau komite kebijakan pembiayaan terkait, dengan tetap memperhatikan kualitas penyaluran dan kesesuaian dengan sektor prioritas.

Efektivitas penyaluran Kredit Program disusun berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain realisasi penyaluran kredit terhadap target, penyaluran kepada sektor produktif dan prioritas, serta cakupan dan karakteristik debitur penerima manfaat. Dalam konteks Kredit Usaha Alsintan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap peningkatan produktivitas dan modernisasi sektor pertanian. Pada Kredit Industri Padat Karya, indikator ini menggambarkan kontribusi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pada Kredit Program Perumahan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap penyediaan hunian layak dan pengurangan backlog perumahan.

Target Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Renstra K/L, serta mempertimbangkan kapasitas pembiayaan, kondisi perekonomian, dan risiko pelaksanaan program. Capaian indikator ini diharapkan dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan Kredit Program sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembiayaan yang efektif, akuntabel, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja Kementerian/Lembaga.

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP beberapa indikator sebagai berikut:

No	Jenis Kredit Program	Indikator Capaian	Target	Bobot
1	Kredit Usaha Alsintan	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan	TW 1: Rp 23,31 Miliar TW 2: Rp 46,62 Miliar TW 3: Rp 69,93 Miliar TW 4: Rp 93,24 Miliar	20%
2	Kredit Industri Padat Karya	Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	TW 1: Rp 4,39 Miliar TW 2: Rp 8,79 Miliar TW 3: Rp 13,19 Miliar TW 4: Rp 17,58 Miliar	10%
3	Kredit Program Perumahan	Realisasi Kredit Program Perumahan	TW 1: Rp 2,81 Triliun TW 2: Rp 5,62 Triliun TW 3: Rp 8,43 Triliun TW 4: Rp 11,24 Triliun	70%

Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP = $(20\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Usaha Alsintan} \times 100\%) + (10\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya} \times 100\%) + (70\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Program Perumahan} \times 100\%)$

Besaran pembobotan ditetapkan berdasarkan historis realisasi penyaluran KUA, KIPK dan KPP pada tahun sebelumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program tahun 2026 sebesar 80% dengan target tiap Triwulan ditetapkan masing-masing sebesar 20%

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 500% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	Persen	20	100	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (20%)	Rp23,31 M	Rp 31,99 M	100%	20%
Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (10%)	Rp4,39 M	66,37 M	100%	10%
Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (70%)	Rp2,81 T	10,12 T	100%	70%
Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP				100%

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
Penyusunan dan implementasi kredit program usaha alat dan mesin pertanian			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026
2.	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KUA	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KUA TW I	Terlaksana	
Penyusunan dan implementasi kredit program kepada usaha di sektor industri padat karya (KIPK)			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026
2.	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KIPK TW I	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
Penyusunan dan implementasi kredit program kepada usaha di sektor perumahan			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026

2.	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP)	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KPP TW I	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyaluran Kredit Program mengalami keterlambatan disebabkan penyesuaian kebijakan penyaluran Kredit Program;
2. Beberapa Penyalur dan Penjamin Kredit Program belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran Kredit Program.

1.4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana adalah ukuran tercapainya pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR Pascabencana dinilai berdasarkan terlaksananya perlakuan khusus KUR yang terbagi ke dalam tiga periode yaitu:

1. Periode Pemetaan (berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026)
2. Periode Relaksasi (berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)

3. Periode Percepatan Pemulihan (berlaku sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)

Perlakuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, baik dari sisi substansi kebijakan maupun ketepatan waktu pelaksanaan antar periode.

Hasil Pengukuran Kinerja

IKU Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana dihitung berdasarkan terlaksananya *timeline* perlakuan KUR Pascabencana sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan di permenko Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana:

1. TW 1: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana di Periode Pemetaan yang merupakan kegiatan penundaan pembayaran pokok dan bunga tanpa ada sanksi: 20%
2. TW 2: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor: 40%
3. TW 3 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 60%
4. TW 4 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 80%

Hingga Triwulan I Tahun 2026, IKU Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.4 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	Persen	20	20	100%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR Pasca Bencana telah sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan di permenko Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, di mana pada TW I memberikan masa tenggang kepada debitur KUR di wilayah terdampak bencana, di mana kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/margin tidak dibayarkan selama masa tenggang tanpa dikenakan sanksi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pasca Bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kepada stakeholders terkait	Terlaksana	- Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Padang, Sumbar tanggal 6 Februari 2026 - Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Medan, Sumut tanggal 20 Februari 2026 - Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Banda Aceh, Aceh tanggal 27 Februari 2026
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Pascabencana TW I 2026	Terlaksana	- Rapat Pembahasan Implementasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana tanggal 18 Februari 2026 - Rapat Pembahasan Usulan Pengaturan Kebijakan Penghapusan KUR Pascabencana tanggal 20 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan proyeksi efisiensi mencapai Rp 100.000.000,-.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR Pascabencana.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR Pascabencana tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran

1.5. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Latar Belakang

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, BUMN diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian memberikan berbagai penugasan kepada beberapa BUMN untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2026.

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN menggambarkan bagaimana realisasi pelaksanaan penugasan yang dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, daftar penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Penugasan Pemerintah kepada BUMN

No	Sektor	Penugasan
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) 2. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 3. Penyediaan dan Pendistribusian Isu Ulang LPG Tabung 3kg 4. Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran 5. Pemberian Diskon Listrik sebesar 50% untuk Konsumen Rumah Tangga 6. Pemberian subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu) 7. Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi & Kesehatan	1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan Produksi gula 3. Peningkatan Rendemen gula

4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera 2. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam rangka HBKN Lebaran dan periode Liburan Sekolah tahun 2026
5	Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	1. Penyalur Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 2. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Perhitungan capaian dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diberikan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Realisasi Penugasan Pemerintah adalah sebesar 80% yang ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja serta koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Indikator Penyelesaian Penugasan dijelaskan lebih lanjut pada Manual IKU masing-masing Asisten Deputi pengampu penugasan.

Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar 20% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.5 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	20	20	100%

Rincian penugasan pemerintah yang telah selesai sebagaimana berikut:

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) 2. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
Industri Manufaktur Agro Farmasi dan Kesehatan	1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan Produksi gula 3. Peningkatan Rendemen gula
Infrastruktur dan Logistik	1. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera 2. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam rangka HBKN Lebaran dan periode Liburan Sekolah tahun 2026

Sektor Jasa
Keuangan dan Usaha
Bisnis

1. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem
Usaha Bullion

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Mempertimbangkan persentase realisasi penugasan pemerintah kepada BUMN sampai dengan Triwulan I serta upaya yang dilakukan, maka target persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rakor Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Terlaksana	Rapat Koordinasi Kegiatan Usaha Bullion tanggal 30 Januari 2026
2.	Rakor Kebijakan Percepatan Swasembada Gula bersama K/L terkait maupun BUMN sektor Agro	Terlaksana	Telah dilakukan koodinasi dengan PTPN III (Persero)/PT SGN pada tanggal 27 Maret 2026 terkait upaya percepatan swasembada gula melalui: 1. Konsolidasi antara ID Food dan PT SGN terkait merger atau penggabungan Pabrik Gula dari ID Food ke PT SGN. 2. Optimalisasi pengelolaan Lahan HGU dan Non-HGU PTPN. 3. Kerja sama kemitraan dengan petani tebu rakyat.

Upaya Nyata Untuk Mencapai Kinerja

Unit kerja telah melakukan identifikasi peran strategis dengan PTPN Group dan ID FOOD dalam penguatan ekosistem agro nasional dan pencapaian penugasan pemerintah, khususnya terkait komoditas pangan strategis dan hilirisasi produk perkebunan. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian BUMN untuk menyelaraskan arah kebijakan BUMN pangan dengan target ketahanan pangan nasional, seperti integrasi rantai pasok dan efisiensi logistik.

Efisiensi Pelaksanaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pemanfaatan data kinerja dan rencana bisnis yang telah tersedia, baik dari internal PTPN Group dan ID FOOD maupun dari Kementerian BUMN, memungkinkan proses analisis berjalan lebih cepat dan terarah, tanpa memerlukan riset primer tambahan berkat basis informasi yang telah tervalidasi. Sinergi dengan tim teknis Kementerian BUMN turut memperkuat akurasi rekomendasi kebijakan yang disusun, sekaligus mengurangi kebutuhan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp40.000.000,- hingga Rp30.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Perbedaan pendekatan bisnis antar-BUMN, khususnya antara entitas *holding* dan anak usaha, menimbulkan tantangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas entitas dan tetap relevan secara operasional.
2. Integrasi data yang belum optimal antara BUMN (PTPN Group dan ID FOOD) dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian BUMN, menghambat analisis rantai pasok secara menyeluruh dan berdampak pada akurasi proyeksi.
3. Musim Giling di Triwulan I dimulai pada bulan Maret, sehingga menyebabkan capaian realisasi penugasan swasembada gula masih sangat rendah.
4. Proses koordinasi awal untuk menghimpun data target dan realisasi berjalan lambat karena beberapa BUMN kurang responsif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
5. Terdapat beberapa BUMN yang bersikap kooperatif, namun mensyaratkan adanya legalitas permohonan data melalui surat dinas resmi dari Kemenko Perekonomian.
6. Terdapat pendapat lain di media sosial terkait dengan kebijakan diskon transportasi dimana sejumlah Masyarakat menyampaikan bahwa lebih dibutuhkan diskon harga sembako ketimbang diskon transportasi;
7. Tantangan pemberian diskon tarif tol pada periode akhir libur sekolah di ruas tol Jakarta – Cikampek adalah pada penjelasan detail mengenai hitungan bisnis terkait insentif diskon ini kepada investor swasta terutama investor asing, karena 60% saham JLC ini dimiliki investor swasta. Para investor tidak mempermasalahkan adanya insentif diskon ini tetapi dikembalikan ke bisnis awal dan dalam PPJT tidak ada pasal mengenai diskon. Dalam hal ini, investor menghubungi Perusahaan menanyakan jangka waktu pemberian diskon tarif tol karena tidak disebutkan periode Waktunya.
8. Permasalahan pada dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif.

9. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan mendatang agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Unit kerja mendorong pembentukan satgas lintas K/L dan BUMN untuk memperkuat koordinasi teknis, pengembangan sistem data terintegrasi antar-BUMN untuk mendukung analisis berbasis eviden dan pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat serta responsif terhadap dinamika lapangan.
2. Melakukan identifikasi risiko bencana serta menambah infrastruktur bersama K/L teknis, penyelenggaraan forum koordinasi triwulanan antara unit kerja, Kementerian BUMN, BUMN terkait, dan K/L pendukung, guna memastikan rekomendasi kebijakan tetap relevan dan adaptif.
3. Penyiapan infrastruktur dan sarana prasarana dalam kegiatan pemanenan tebu, pengangkutan, pengolahan, dan pengemasan gula yang dihasilkan dari tebu PTPN III,
4. Menyusun template rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi fleksibilitas model bisnis masing-masing entitas.
5. Membangun hubungan kerja yang erat melalui pendekatan persuasif, personal, dan berkelanjutan langsung kepada PIC masing-masing BUMN demi mempercepat jalur pertukaran informasi.
6. Untuk melihat multiplier effect dari diskon tarif tol yang telah dijalankan selama ini, perlu mengecek apakah terdapat kenaikan pada data pariwisata sekitar yang terhubung jalan tol, salah satunya adalah kenaikan wisatawan yang berkunjung. Selain itu perlu juga melihat dampak perekonomian dari diberlakukannya diskon tarif tol selama ini kepada masyarakat sekitar;

2 Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Implementasi pada Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Tingkat Inflasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Kedeputian 1 pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang

dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

IHK_t : IHK periode ini

IHK_{t-1} : IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 serta PMK No. 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Adapun target tiap triwulan sama dengan target tahunan (2,5% ± 1%) untuk tetap menjaga tingkat inflasi sepanjang tahun.

Hingga

Triwulan I
2026, tingkat
sebesar 3,48%
mencapai

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Tahun
inflasi
atau
100%

dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Tingkat Inflasi	Persen	2,5% ± 1%	3,48%	100 %

Pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar 3,48% (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi 2 bulan secara beruntun. Inflasi pada Triwulan I utamanya masih dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik yang kembali normal (tanpa diskon) seiring dengan berakhirnya program pemberian diskon 50% dan mengalami inflasi sebesar 1,18%. Namun demikian, pelanggan pasca bayar masih mengalami penurunan harga atas konsumsi pada Maret 2026.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,60% (yoy) dengan batas atas 2,80% (yoy). Inflasi tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Mempertimbangkan realisasi tingkat inflasi sampai dengan Triwulan I serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, TPIP, TIPID, serta stakeholder terkait, maka target tingkat inflasi hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan akan berada pada rentang sasaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
2.	Penetapan Program Kerja TPIP dalam pengendalian inflasi 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
3.	Penyusunan Laporan Menko kepada Presiden Terkait Realisasi Inflasi dan intervensi pemerintah TW IV 2025	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EK.02.01-117/M.EKON/04/2026
4.	Penyusunan surat himbauan Menko kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri	Terlaksana	Penyampaian surat himbauan oleh Menko ke seluruh kepala daerah perihal Upaya Menjaga Stabilisasi Harga pada Momen Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 2026
5.	Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
6.	Pelaksanaan HLM TPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan High Level Meeting TPID di beberapa daerah sebagai bentuk sinergi dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Salah satunya DKI Jakarta tanggal 5 Maret 2026

Upaya Nyata Pencapaian Kinerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian surat himbauan oleh Menko ke seluruh kepala daerah perihal Upaya Menjaga Stabilisasi Harga pada Momen Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 2026
2. Pelaksanaan capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 yang dimulai sejak Januari 2026 hingga Mei 2026 dengan

melakukan verifikasi dokumen penilaian 4. Pelaksanaan GNPIP dan Rakor TPIP-TPID di kawasan Jawa pada tanggal 21 Februari 2026

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada Triwulan I berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi yang cukup rendah pada triwulan I akan meningkat pada triwulan berikutnya karena stimulus daya beli sehingga masyarakat dapat kembali berbelanja. Langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi guna menjaga inflasi dalam kisaran sasaran antara lain dengan melaksanakan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp5.000.000,- hingga Rp20.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Ketidakpastian ekonomi global yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik dan konflik Timur-Tengah mendorong peningkatan harga komoditas global. Pelemahan nilai tukar akibat indeks dollar (DXY) yang menguat, serta harga emas global turut mendorong laju inflasi di banyak negara termasuk Indonesia
2. Pada Januari-Februari 2026 terjadi deflasi utamanya dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA-2200 VA selama bulan Januari-Februari 2026.
3. Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca seperti produksi bawang merah yang mengalami kendala akibat gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di beberapa daerah sentra produksi terutama wilayah Pantura dan produksi cabai mengalami penurunan akibat gangguan cuaca yang terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Jawa Tengah. Sementara peningkatan harga daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan beras didorong oleh kenaikan permintaan selama periode HBKN Idul Fitri.
4. Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.
5. Inflasi administered *price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dengan subtema tematik per kawasan

2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi kepada anggota TPIP maupun K/L terkait

3 Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. *Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital*

Latar Belakang

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:

- Digital (skor indeks 80-100)
- Maju (skor indeks 50-80)
- Berkembang (skor indeks 20-50)
- Inisiasi (skor indeks 0-20)

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)
2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 92% berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Satgas P2DD tanggal 17 Januari 2026.

Adapun target pelaporan dilakukan tiap semester yang diambil datanya dari hasil Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada Agustus 2026, sehingga realisasi Triwulan I Tahun 2026 diasumsikan masih sama dengan hasil survei tahun 2024 yaitu 91% atau mencapai 100% terhadap target Semester I sebesar 91%, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

3.1 Persentase Jumlah
Pemerintah Daerah yang
Masuk Kategori Digital

Persen

91%

91%

100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penetapan Program Kerja Satgas P2DD 2026	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan, penetapan, dan distribusi Surat Menko Perekonomian tentang Arah Kebijakan dan Program Kerja Satgas P2DD, Februari 2026
2.	Evaluasi Indeks ETPD Semester II 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Sekretariat Satuan Tugas P2DD Awal 2026, 22 Januari 2026; 2. Rapat Tindak Lanjut Rakor Sekretariat Satgas P2DD dengan BI dan Kementerian Keuangan, Januari 2026

Upaya Nyata Pencapaian Kinerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Menko Perekonomian Hasil Rakornas dan Rakorpusda P2DD 2025 kepada seluruh K/L Satgas, Kepala Daerah, Kepala Perwakilan BI dan BPD, 15 Januari 2026;
2. Rapat Koordinasi TP2DD se-Banten Tahun 2026, 20 Januari 2026
3. Penyusunan, penetapan, dan distribusi surat Evaluasi Kinerja TP2DD 2025 (*Championships* 2026), 28 Januari 2026;
4. Rapat Koordinasi Wilayah serta Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (Rakorwil & Katalis I P2DD) Tahun 2026, 9 dan 12 Februari 2026;
5. Penyusunan, penetapan dan distribusi surat Dukungan Satgas P2DD untuk Penguatan SIPD kepada Kementerian Dalam Negeri, Februari 2026;
6. Penyusunan, penetapan dan distribusi Rekomendasi Penguatan Ekosistem Digital Daerah sebagai Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pelaksana Satgas P2DD, Februari 2026;

7. Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (Katalis P2DD), 4 Maret 2026;
8. High Level Meeting (HLM) TP2DD Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Maret 2026;
9. Pembahasan Policy Matrix Digitalisasi Daerah dengan ADB dan K/L, Februari-Maret 2026

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Kesulitan menyatukan waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis.
2. Adanya perubahan struktur organisasi, nomenklatur, dan pejabat di K/L yang terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas pihak secara lebih terstruktur, percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, penyesuaian konsep/format kegiatan yang akan datang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

4 Sasaran Program 4: Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 4: Terjaganya kualitas pengelolaan Kebijakan Stimulus Ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran tingkat keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program stimulus ekonomi yang berdampak pada kinerja BUMN, sektor usaha, ketenagakerjaan, dan konsumsi masyarakat, yang diukur berdasarkan kesesuaian realisasi output dan/atau outcome program terhadap target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa stimulus ekonomi tahun 2026 yang dikoordinasikan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN antara lain:

No	Program Stimulus Ekonomi	Kegiatan	Output	Target Sasaran
1	Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)	Monitoring Evaluasi	Laporan Monev	Triwulan I 2026

2	Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
3	Penyesuaian Jangka Waktu Pemanfaatan dan Penerima Manfaat PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM tertentu s.d. Tahun 2029	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
4	Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata dan Industri Padat Karya (APBN 2026)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
5	Perpanjangan PPN DTP Sektor Perumahan, untuk Rumah dengan harga s.d Rp5 Miliar untuk bagian harga Rp2 Miliar sebesar 100% (Jan-Des 2026) dan diperpanjang hingga 2027 (Konpers APBN Kita)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
6	Perpanjangan dan Perluasan Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) Tahun 2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
7	Diskon Tiket Kereta (PT KAI) sebesar 30% x harga tiket (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
8	Diskon Angkutan Laut (PT PELNI) sebesar 20% x tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
9	Diskon Angkutan Penyeberangan (PT ASDP) sebesar 100% Jasa Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026 Triwulan I dan IV 2026
10	Diskon Tiket Pesawat (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026

		Monitoring Evaluasi		
--	--	------------------------	--	--

Sampai dengan Januari 2026, Program Stimulus Ekonomi yang telah ditetapkan sebagai target sebanyak 10 program sebagaimana tabel di atas. Jumlah program stimulus dapat bertambah sesuai kondisi ekonomi terkini dan keputusan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU persentase efektifitas program stimulus ekonomi adalah pada skala efektif (3). Untuk menghitung Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi dihitung berdasarkan rumus:

Persentase Efektivitas = Program stimulus ekonomi yang memenuhi target sasaran/program stimulus ekonomi yang diluncurkan x 100%

Nilai Akhir persentase efektivitas digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil penghitungan Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.1 Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	Persen	80	80	100

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai persentase efektifitas program stimulus ekonomi sampai dengan Triwulan I, maka persentase efektifitas program stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026	Terlaksana	FGD Outlook dan Strategi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

			Tahun 2026 dengan Para Ekonom dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN pada tanggal 7 Januari 2026
2.	Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan Tahun 2025	Terlaksana	1. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026. 2. Konferensi Pers Para Menteri terkait Capaian Ekonomi Tahun 2025, Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri, WFA dan Bantuan Pangan pada Tanggal 10 Februari 2026
3.	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan I 2026 berupa diskon tarif tol, diskon transportasi, dan bantuan pangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat 1. Rapat Eselon I Stimulus Diskon Transportasi tentang Evaluasi Implementasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2025/2026 dan Persiapan Implementasi Diskon Transportasi Periode Libur Idul Fitri 2026 pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026. 2. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Stimulus Ekonomi Pada Tanggal 29 Januari 2026. 3. Rakorses Tindak Lanjut RTM dan Persiapan Pelaksanaan

	Stimulus Diskon Transportasi dan Work From Anywhere (WFA) Periode Lebaran Idul Fitri 2026M/1447H pada tanggal 30 Januari 2026
	4. Rakorses Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran dan Idul Fitri 1447H/2026M pada tanggal 6 Februari 2026.
	5. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026.
	6. Konferensi Pers Para Menteri terkait Capaian Ekonomi Tahun 2025, Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri, WFA dan Bantuan Pangan pada Tanggal 10 Februari 2026

Pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan Policy Outreach Forum pada Triwulan I Tahun 2026 saling melengkapi dalam mendukung pencapaian IKU. Rapat koordinasi dari tingkat menteri hingga teknis menghasilkan penyelarasan langkah implementasi kebijakan dan tindak lanjut lintas Kementerian/Lembaga, FGD memperkaya substansi kebijakan melalui masukan dari para ekonom dan praktisi, sedangkan Policy Outreach Forum memperluas diseminasi kebijakan kepada akademisi dan generasi muda. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi landasan dalam penyempurnaan implementasi kebijakan stimulus ekonomi pada periode berikutnya.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan stimulus ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi serta menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Efisiensi Sumber Daya:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, penggunaan forum koordinasi yang telah ada, serta pemanfaatan media rapat daring dan luring sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga juga menghindari duplikasi pembahasan dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan.. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp35.000.000,- hingga Rp20.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat kesiapan Kementerian/Lembaga dalam penyampaian data dan informasi pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi.
2. Dinamika perkembangan kondisi ekonomi serta perubahan kebutuhan kebijakan yang memerlukan penyesuaian dan koordinasi lintas sektor secara cepat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi, memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga potensi permasalahan implementasi dapat diidentifikasi lebih awal, dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.
2. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penyempurnaan sistem pelaporan, percepatan penyampaian data, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program.

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;
3. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian di

Bidang Koordinasi

Pengelolaan dan

Pengembangan

Usaha BUMN

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN.

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.
2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.
4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.
5. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Nilai Indeks Efektivitas SKP kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas SKP kebijakan yang terdapat pada seluruh Asisten Deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Keterangan:

AD 1 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

AD 2 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- AD 3 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.
- AD 4 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.
- AD 5 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4) : rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3) : rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2) : rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1) : rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas SKP Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada triwulan I tahun 2026 adalah pada skala efektif (3). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP masing-masing Asdep pada triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Efektivitas SKP (%)
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	20
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	20
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	21
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	20
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	20

Dengan menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebesar 20,2% atau berada pada rentang kategori Kurang Efektif (1 dari 4).

Berdasarkan penghitungan tersebut di atas maka Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN triwulan I tahun 2026 dapat disajikan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Indeks

3 dari 4

1

33,33

Sampai dengan Triwulan I, Deputi 1 berupaya memberikan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Deputi 1 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Memperhatikan hal tersebut, maka persentase pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir Semester I Tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Utilisasi Belanja Modal tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina tanggal 12 Januari 2026 dalam upaya mendorong pembahasan lebih lanjut dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang <i>in-charge</i> dengan proyek pembangunan 18 kilang dan tangki tersebut; 2. Rapat pembahasan rencana awal tahapan proyek mobil nasional bersama Direktur PT Pindad pada tanggal 5 Januari 2026; 3. Monitoring dan evaluasi on desk Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Himbara pada Triwulan I Tahun 2026.
2.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat monitoring dan evaluasi penjaminan pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2025 pada tanggal 30 Januari 2026;

			2. Rapat konsolidasi pelaksanaan kredit program tahun 2026 pada tanggal 21 Januari 2026
3.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyelesaian Penugasan BUMN	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pasokan BBM dan LPG Menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri 2026 pada tanggal 5 Maret 2026 di Bandung yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait; 2. Mendorong percepatan kilang, salah satunya pembangunan kilang <i>Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V</i> Balikpapan yang telah diresmikan oleh Presiden pada 12 Januari 2026; 3. Diskusi (FGD) terkait Dukungan <i>Sovereign Guarantee</i> Proyek <i>Grass Root Refinery (GRR)</i> Tuban pada tanggal 22 Januari 2026 di Surabaya yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait. Sehingga diperoleh kesimpulan perlunya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan proyek GRR Tuban melalui penjaminan pemerintah kepada BUMN untuk meningkatkan kelayakan dan daya tarik proyek bagi investor dan lembaga pembiayaan, serta inisiasi penyusunan Perpres Penugasan dari Kementerian ESDM atau BP BUMN; 4. FGD dukungan pembiayaan pembangunan GRR Tuban pada tanggal 11 Maret 2026, sehingga diperoleh hasil bahwa adanya kebutuhan dukungan pembiayaan khususnya dari luar negeri serta perlunya koordinasi bersama K/L dan beberapa pemerintah luar negeri dalam upaya kerjasama pembiayaan proyek; 5. Rapat rencana pembangunan jaringan gas bumi: dampak tambahan anggaran dari APBN pada tanggal 2 Juni 2026, sehingga diperoleh hasil bahwa alokasi ABT bersifat tahun jamak yang difokuskan pada penyelesaian output keseluruhan di akhir masa kontrak (tidak memiliki alokasi target capaian per tahun); 6. Koordinasi dengan PTPN III (Persero)/PT SGN pada tanggal 27

	Maret 2026 terkait upaya percepatan swasembada gula;
7.	Koordinasi rencana pelaksanaan stimulus diskon transportasi periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri tahun 2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP;
8.	Koordinasi persiapan reimbursement diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP;
9.	Koordinasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana oleh BUMN Karya;
10.	Koordinasi penyelesaian pembayaran biaya salur penyaluran BLTS Kesra oleh PT Pos Indonesia.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;
 - b. Koordinasi antar K/L masih kompleks.
2. Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM
 - a. Terdapat BUMN kurang responsif dan tidak langsung memberikan informasi yang dibutuhkan selama koordinasi awal untuk mengetahui target Capex BUMN bidang ESDM;
 - b. Tanggapan BUMN dan BP BUMN yang kurang responsif dalam menyampaikan data terbaru terkait realisasi Capex TW I Tahun 2026.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - a. Keterbatasan alokasi anggaran koordinasi lapangan;
 - b. Minimnya ketersediaan data terkini realisasi Capex dari BUMN;
 - c. Beberapa BUMN belum menjadikan percepatan realisasi Capex sebagai prioritas utama mengingat kebijakan BPI Danantara.
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
 - a. Pendapat masyarakat di media sosial yang lebih membutuhkan diskon harga sembako daripada kebijakan diskon transportasi;
 - b. Belum adanya penjelasan rinci mengenai perhitungan bisnis dan dasar pemberian insentif kepada investor swasta terkait kebijakan diskon tarif tol Jakarta–Cikampek pada akhir libur sekolah, terutama karena 60% saham JLC dimiliki investor swasta. Meskipun investor tidak menolak kebijakan diskon tersebut, mereka mempertanyakan dasar pelaksanaannya karena dalam PPJT tidak terdapat ketentuan mengenai diskon tarif tol, termasuk periode pemberlakuannya. Akibatnya, investor meminta kepastian terkait jangka waktu pemberian diskon tarif tol kepada perusahaan;
 - c. Tidak adanya dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif tol;

- d. Masih kompleksnya koordinasi antar K/L terkait.
- 5. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan realisasi Belanja Modal BUMN Himbara dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi yang diperlukan belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam proses konsolidasi oleh BUMN;
 - b. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - c. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - d. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada sektor nonproduksi;
 - e. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - f. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting;
 - g. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - h. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting;
 - i. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- 1. Memperbaharui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
- 2. Meningkatkan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi;
- 3. Peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN, seiring dengan normalisasi alokasi anggaran;
- 4. Optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN;
- 5. Pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex yang lebih tepat sasaran;
- 6. Meningkatkan koordinasi capaian realisasi jumlah belanja modal BUMN Himbara serta pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja belanja modal BUMN terkait;
- 7. Meningkatkan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi kinerja belanja modal BUMN Himbara;
- 8. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru;

9. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas;
10. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi
2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.
3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.
4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP \text{ ISU } 1 \times SKP \text{ ISU } 2 \times SKP \text{ ISU } 3 \times SKP \text{ ISU } 4}$$

Keterangan:

- SKP ISU 1 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi.
- SKP ISU 2 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.
- SKP ISU 3 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.

SKP ISU 4 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian
Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.

Adapun definisi SKP masing-masing isu tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inflasi (SKP Inflasi)

Inflasi yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Stimulus Ekonomi (SKP Stimulus Ekonomi)

Stimulus Ekonomi merupakan upaya peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal termasuk penguatan neraca transaksi berjalan sertaantisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang antara lain kebijakan tarif AS dan dinamika politik di Timur Tengah, yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Digitalisasi Daerah (SKP Digitalisasi Daerah)

Digitalisasi Daerah merupakan proses transformasi suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi Pemerintah Daerah dalam survei Indeks ETPD diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

4. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inovasi Pembiayaan Daerah (SKP Inovasi Pembiayaan Daerah)

Inovasi pembiayaan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Inovasi pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pendanaan, tetapi juga sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Upaya peningkatan inovasi pembiayaan daerah diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4) : rentang nilai 91 - 100

Efektif (3) : rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2) : rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1) : rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah Triwulan I adalah pada **skala 3 (efektif)**. Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP Isu Strategis pada TW I sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Indeks Efektivitas SKP
1	Inflasi	20
2	Stimulus Ekonomi	20
3	Digitalisasi Daerah	
4	Inovasi Pembiayaan Daerah	20

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[4]{SKP \text{ ISU } 1 \times SKP \text{ ISU } 2 \times SKP \text{ ISU } 3 \times SKP \text{ ISU } 4}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan I **sebesar 20%** dan apabila dikonversikan berada pada skala **kurang efektif (1 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	33,33

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan I, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah dan Inovasi Pembiayaan Daerah hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025 - 2027	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dan finalisasi Penyusunan Peta Jalan dengan seluruh anggota TPIP tanggal 20 Maret 2026
2.	Pelaksanaan Kinerja TPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja TPID tahun 2024 tahap I tanggal 10-14 Maret 2026

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi tiap isu strategis sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi

- Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca.
- Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.
- Inflasi administered *price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut

2. Stimulus Ekonomi

- Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan, untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi *onedrive* serta dibuat database update perekonomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.
- Penghematan anggaran pemerintah dapat membebani kinerja perekonomian untuk tahun 2026 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai.
- Pelantikan Presiden AS, Donald Trump, dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi global seiring Trump terus mengancam akan meningkatkan tarif impor produk secara unilateral sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga kestabilan sektor eksternal Indonesia khususnya kinerja ekspor nasional.

3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

- Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemnda dan BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring)
- Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisian survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung.

4. Inovasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Peningkatan metode penyampaian materi: Mengoptimalkan metode penyampaian dengan kombinasi penjelasan terstruktur, sesi tanya jawab interaktif, dan simulasi pengisian, sehingga peserta lebih mudah memahami materi serta termotivasi untuk berpartisipasi secara penuh.
2. Penyediaan materi lanjutan: Memberikan bahan presentasi, video rekaman, dan akses konsultasi lanjutan pasca-sosialisasi untuk memperkuat pemahaman dan tindak lanjut di daerah masing-masing.
3. Penguatan Tim Kerja dan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan serta penggunaan teknologi informasi termasuk one drive. Terkait kebijakan DHE SDA, diperlukan monitoring atas implementasi PP 8/2026 untuk memastikan efektifitas kebijakan.

6 Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dilakukan dengan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut

**Indeks Kepuasan
Layanan Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian**

$$= \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep})}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4, penetapan target berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, belum ada pelaksanaan Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Survei dilaksanakan pada akhir Semester I dan Semester II Tahun 2026, sehingga realisasi Triwulan I Tahun 2026 diasumsikan masih sama dengan hasil survei tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	4	120

Sampai dengan Triwulan I, Deputy 1 berupaya memberikan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Deputy I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Memperhatikan hal tersebut, maka persentase pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir Semester I Tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan penyusunan konsep awal survei kepuasan layanan kepada stakeholders oleh masing-masing unit Eselon II

	2. Telah dilaksanakan inventarisasi responden survei
2	Koordinasi <i>debottlenecking</i> isu-isu strategis BUMN
3	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan google form sebagai instrumen kuesioner survei.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7 Sasaran Program 7: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Rencana Aksi Deputy terkait pemenuhan tingkat keberhasilan Zona Integritas, nilai SAKIP, dan tingkat digitalisasi arsip.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2026, telah dirumuskan 11 Renaksi RB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	1. Penyusunan Rencana Aksi RB Gender dan RB Tematik	1. Pelaporan/Pemantauan/Pelaksanaan Rencana Aksi RB Gender dan RB Tematik	1. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2027
			4. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja pada Triwulan I, perlu diketahui pelaksanaan dari Rencana Aksi TW I sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pelaksanaan RB} &= \frac{3}{11} \times 100\% \\
 &= 27,27\%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	20	27,27	120

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang memenuhi target menunjukkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas tercapai. Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini

akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan April 2026
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar. Selain itu, pemberian disposisi juga menggunakan aplikasi Srikandi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (online), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 April 2026
Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha BUMN

TTD

Ferry Irawan